

## STRATEGI PENANGANAN CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) TAHUN 2020-2022

**Afridika Fernanda<sup>1</sup>**

Universitas PGRI Sumatera Barat<sup>1</sup>  
[Afridikafernanda17@gmail.com](mailto:Afridikafernanda17@gmail.com)<sup>1</sup>

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pemerintah merespons peningkatan kasus COVID-19 yang signifikan sejak Maret 2020. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan sejarah, memanfaatkan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah melaksanakan berbagai kebijakan, seperti pembentukan Satuan Tugas COVID-19, penerapan jaga jarak sosial, serta pembatasan aktivitas publik. Selain itu, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan kebijakan tersebut. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa edukasi kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, kerja sama berbagai pihak, serta kepatuhan terhadap protokol kesehatan merupakan kunci dalam menghadapi pandemi dan sebagai persiapan menghadapi krisis kesehatan di masa depan.

**Kata Kunci:** Analisis Sejarah, COVID-19, Kesehatan Masyarakat, Protokol Kesehatan, Respons Pandemi.

### ABSTRACT

*The purpose of this research is to understand how the government responded to the rapid increase of COVID-19 cases that began in March 2020. The research method used is field research with a historical approach, supported by primary and secondary data. The findings show that several policies were implemented, such as the establishment of the COVID-19 Task Force, enforcement of social distancing, and restrictions on public activities. Community participation was also an essential factor in the effectiveness of these policies. The conclusion of this study emphasizes that sustainable public health education, cooperation among stakeholders, and consistent adherence to health protocols are crucial in overcoming pandemics and preparing for future public health crises.*

**Keywords:** COVID-19, Health Protocols, Historical Analysis, Pandemic Response, Public Health.

## PENDAHULUAN

Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang melanda dunia sejak akhir tahun 2019 telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, ekonomi, pendidikan, hingga interaksi sosial. Di Indonesia, kasus pertama terdeteksi pada Maret 2020 dan terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada tahun 2021. Kota Padang, sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat, merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kasus yang cukup tinggi sehingga membutuhkan penanganan serius dari pemerintah daerah. Kondisi ini mendorong perlunya kajian akademik untuk menganalisis kebijakan penanganan COVID-19, khususnya di Kota Padang.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Misalnya, penelitian oleh Herliandry et al. (2020) membahas strategi pembelajaran daring selama masa pandemi dan menekankan pentingnya adaptasi pendidikan di tengah kebijakan pembatasan sosial. Penelitian lain oleh Djalante et al. (2020) menyoroti respons awal pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemi, termasuk pembentukan Gugus Tugas COVID-19 serta pelaksanaan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa koordinasi antar-lembaga pemerintah memiliki peran penting dalam mengendalikan penyebaran virus.

Selanjutnya, penelitian lain mengungkapkan bahwa kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) efektif dalam menekan mobilitas masyarakat dan

membantu mengendalikan penyebaran COVID-19, meskipun berdampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi, khususnya pada sektor usaha kecil dan menengah (UKM/UMKM) (Hartanto, 2022; Prasetyo, 2024). Banyak pelaku usaha kecil, seperti pedagang kaki lima dan pengemudi ojek daring, mengalami penurunan pendapatan yang drastis akibat pembatasan jam operasional, berkurangnya jumlah pelanggan, dan peralihan konsumen ke belanja daring. Sementara itu, penelitian oleh Syafrida & Hartati (2020) menekankan bahwa keberhasilan penanganan pandemi sangat bergantung pada tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, terlihat bahwa kajian mengenai COVID-19 di Indonesia cukup beragam, namun sebagian besar masih berfokus pada kebijakan di tingkat nasional. Novelty penelitian ini terletak pada upayanya memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai strategi penanganan COVID-19 di tingkat daerah, yaitu Kota Padang, serta menganalisis bagaimana kebijakan pemerintah kota direspons oleh masyarakat. Hal ini penting karena setiap daerah memiliki kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda, sehingga strategi penanganannya pun memiliki dinamika tersendiri.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah Kota Padang dalam menangani penyebaran COVID-19 pada periode 2020–2022 serta dampaknya terhadap masyarakat. Fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian

sebelumnya karena menitikberatkan pada dinamika penanganan pandemi di tingkat lokal dengan menggunakan pendekatan sejarah dan kebijakan publik.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian sejarah yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis penanganan COVID-19 di Kota Padang pada periode 2020–2022. Lokasi penelitian difokuskan pada Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan salah satu daerah dengan tingkat kasus COVID-19 tertinggi di provinsi tersebut.

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan kunci, yaitu pejabat pemerintah daerah, tenaga medis, dan masyarakat terdampak. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan, artikel, serta literatur yang relevan. Populasi penelitian mencakup seluruh masyarakat Kota Padang yang terpengaruh oleh kebijakan penanganan COVID-19, dengan sampel yang dipilih secara purposive, yakni informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman relevan terkait topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara menggunakan pedoman semi-terstruktur agar informasi yang diperoleh lebih mendalam dan komprehensif. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi, di mana data yang terkumpul diorganisir, dikategorikan, serta

dianalisis untuk menemukan pola dan tema yang muncul. Proses analisis meliputi empat tahapan utama, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mendalam mengenai strategi penanganan COVID-19 di Kota Padang serta dampaknya terhadap masyarakat.

## HASIL PENELITIAN

### Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan COVID-19

Pemerintah Kota Padang mengeluarkan kebijakan awal berupa pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) COVID-19. SATGAS ini berfungsi untuk mengkoordinasikan upaya penanganan, pencegahan, serta memberikan edukasi kepada masyarakat. Salah satu informan, Dr. Hj. Feri Mulyani Hamid, M.Biomed (Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang) menyatakan:

*“Pembentukan SATGAS COVID-19 merupakan langkah awal yang penting untuk mengorganisir semua upaya penanganan dan memberikan edukasi kepada masyarakat.”*  
(Wawancara, 6 Desember 2024)



Gambar 1. Wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan

Sumber: Dokumentasi Wawancara dengan Dr. Hj. Feri Mulyani Hamid, M.Biomed (2024)

Selain itu, pemerintah juga menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan PKM (Pembatasan Kegiatan Masyarakat) untuk membatasi interaksi sosial. Salah satu warga, Doni Anggriawan, menyampaikan: “Awalnya kami merasa terbatas, tetapi kami memahami bahwa ini untuk keselamatan bersama.” (Wawancara, 25 Desember 2024).

### Dampak Kebijakan terhadap Masyarakat

Kebijakan yang diterapkan memberikan dampak besar, baik di bidang kesehatan maupun sosial ekonomi. Data kasus COVID-19 di Kota Padang dari tahun 2020–2022 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Jumlah Kasus COVID-19 di Kota Padang Tahun 2020–2022

Lokasi	Positif	Meninggal	Sembuh	Kasus Meninngal
<b>Padang Utara</b>	<b>29</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>11</b>
Alai Parak Kopi	9	3	6	3
Ulak Karang Selatan	6	1	3	1
Gunung Pangilun	6	2	4	2
Air Tawar Barat	3	1	2	1
Air Tawar Timur	3	2	1	2
Lolong Belanti	2	2	0	2
<b>Padang Barat</b>	<b>43</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>19</b>
Padang Pasir	11	0	5	6
Purus	10	0	5	5
Flamboyan Baru	7	0	6	1
Ujung Gurun	5	0	5	0
Rimbo Kaluang	5	0	2	3
Kampung Jao	3	1	0	2
Berok Nipah	1	0	0	1
Kampung Pondok	1	0	0	1
<b>Padang Timur</b>	<b>70</b>	<b>4</b>	<b>43</b>	<b>23</b>
Andalas	14	1	8	5
Sawah	13	1	10	2
Kubu Dalam Parak Karakah	10	0	6	4
Simpang Haru	7	1	3	3
Jati	7	0	7	0
Jati Baru	7	0	3	4
Parak Gadang Timur	5	0	2	3
Kubu Marapalam	3	1	2	0
Ganting Parak Gadang	2	0	2	0
Sawah	2	0	0	2

Lokasi	Positif	Meninggal	Sembuh	Kasus Meninggal
<b><u>Padang Selatan</u></b>	<b>32</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>16</b>
Mata Air	19	1	8	10
Pasa Gadang	7	0	4	3
Seberang Padang	2	0	1	1
Seberang Palinggam	2	0	0	2
Rawang	1	1	0	0
Alang Laweh	1	1	0	0
<b><u>Nanggalo</u></b>	<b>22</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>11</b>
Kurao Pagang	15	2	5	8
Surau Gadang	7	0	4	3
<b><u>Kuranji</u></b>	<b>90</b>	<b>3</b>	<b>38</b>	<b>49</b>
Kuranji	42	1	14	27
Lubuk Lintah	9	1	4	4
Pasar Ambacang	9	0	5	4
Kalumbuk	9	0	4	5
Korong Gadang	7	0	2	5
Ampang	6	1	4	1
Gunung Sarik	5	0	3	2
Anduring	2	0	2	0
Sungai Sapih	1	0	0	1
<b><u>Pauh</u></b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>27</b>
Piai Tengah	14	0	0	14
Pisang	12	0	8	4
Limau Manis	4	0	0	4
Koto Luar	3	0	2	1
Limau Manis Selatan	3	0	1	2
Binuang Kampung Dalam	2	0	2	0
Cupak Tengah	1	0	0	1
Kapalo koto	1	0	0	1
<b><u>Lubuk Begalung</u></b>	<b>69</b>	<b>2</b>	<b>34</b>	<b>33</b>
Pagambiran Ampalu	20	0	11	9
Banuaran	14	1	3	10
Kampung Baru	6	0	4	2
Parak Laweh Pulau Air	5	0	4	1
Cengkeh	5	0	1	4
Batuang Taba	4	1	2	1
Lubuk Begalung	3	0	3	0
Gurun Laweh	3	0	2	1

Lokasi	Positif	Meninggal	Sembuh	Kasus Meninngal
Koto Baru	3	0	1	2
Tanah Sirah Piai	3	0	1	2
Kampung Jua	2	0	1	1
Pitameh Tanjung Saba	1	0	1	0
<b>Lubuk Kilangan</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>7</b>
Indarung	10	0	6	4
Bandar Bu	5	0	3	2
Bandar Buat	5	0	3	2
Koto Lalang	2	0	1	1
Batu Gadang	1	0	1	0
<b>Koto Tangah</b>	<b>48</b>	<b>5</b>	<b>27</b>	<b>16</b>
Lubuk Buaya	10	1	6	3
Balai Gadang	8	1	5	2
Koto Panjang Ikur Koto	5	0	3	2
Pasie Nan Tigo	4	1	3	0
Parupuk Tabing	4	1	1	2
Batipuh Panjang	4	0	3	1
Bungo Pasang	4	0	3	1
Batang Kabung Ganting	3	1	1	1
Dadok Tunggul Hitam	3	0	0	3
Lubuk Minturun Sungai Lareh	2	0	1	1
Koto Pulaui	1	0	1	0
<b>Bungus Teluk Kabung</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Bungus Barat	2	0	1	1
Bungus Timur	1	0	0	1
<b>Total</b>	<b>464</b>	<b>22</b>	<b>228</b>	<b>214</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang, 2022

### Peran Masyarakat dalam Penanganan COVID-19

Partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting. Program vaksinasi menjadi fokus utama pemerintah, namun sebagian masyarakat masih ragu. Salah satu tokoh masyarakat, Adrianata, menyatakan: “Kami mendukung vaksinasi, tetapi banyak yang masih ragu dan membutuhkan informasi lebih lanjut.” (Wawancara, 2 Februari 2025)

### PEMBAHASAN

Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang luas terhadap masyarakat Kota Padang, baik dari aspek kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Untuk memahami kondisi tersebut, perlu dianalisis bagaimana tren kasus COVID-19 berlangsung dari tahun 2020 hingga 2022 serta kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Padang.

### Tren Kasus COVID-19 di Kota Padang

Data dari Dinas Kesehatan Kota Padang menunjukkan bahwa jumlah kasus COVID-19 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada awal 2020, jumlah kasus relatif sedikit, namun meningkat tajam pada pertengahan tahun 2021. Lonjakan kasus tersebut erat kaitannya dengan masuknya varian Delta yang lebih menular serta tingginya mobilitas masyarakat pada masa itu. Sementara pada tahun 2022, kasus mulai menurun seiring dengan meningkatnya cakupan vaksinasi massal dan adaptasi masyarakat terhadap kebijakan protokol kesehatan.

**Tabel 3. Jumlah Kasus COVID-19 di Kota Padang (2020–2022)**

Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan Utama
2020	9.872 kasus	Awal pandemi, diberlakukan PSBB
2021	23.115 kasus	Puncak gelombang varian Delta, penerapan PPKM ketat
2022	7.420 kasus	Kasus menurun, vaksinasi massal mulai berhasil

### Kebijakan Pemerintah Kota Padang

Pemerintah Kota Padang menyesuaikan kebijakan sesuai dengan perkembangan kasus. Pada tahun 2020, diterapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang membatasi kegiatan masyarakat di ruang publik. Pada 2021, kebijakan diperketat melalui PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), terutama saat varian Delta menyebar luas. Memasuki 2022, fokus kebijakan bergeser pada vaksinasi massal serta pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi.

### Dampak Sosial dan Ekonomi

Kebijakan pembatasan sosial memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas masyarakat. Dari sisi sosial, kegiatan pendidikan beralih ke pembelajaran daring, yang menimbulkan kesenjangan akses teknologi antara peserta didik yang memiliki fasilitas memadai dan yang tidak. Aktivitas keagamaan dan budaya juga dibatasi, sehingga memengaruhi kehidupan sosial masyarakat Minangkabau yang kental dengan budaya berkumpul.

Dari sisi ekonomi, pelaku UMKM mengalami penurunan omzet yang signifikan, sementara banyak pekerja informal kehilangan pendapatan akibat berkurangnya aktivitas ekonomi. Selain itu, tingkat pengangguran juga meningkat, terutama pada sektor jasa dan perdagangan.

### Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

Hasil penelitian ini memiliki perbedaan fokus dengan penelitian terdahulu. Penelitian Samin (2021) dan Sudrajat (2021) lebih menyoroti Koordinasi pemerintah pusat dalam membentuk Satuan Tugas COVID-19 sangat penting untuk memastikan respons yang terorganisir dan efektif terhadap pandemi. Di Indonesia, pembentukan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 merupakan langkah konkret pemerintah pusat, namun pelaksanaannya menghadapi tantangan seperti birokrasi yang rumit dan kurangnya komunikasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga sering terjadi ketidaksesuaian kebijakan yang membingungkan di lapangan.

Sedangkan penelitian Mokodompis (2021) Penelitian mengenai dampak PPKM terhadap

perekonomian nasional menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat seperti PPKM berdampak signifikan pada penurunan aktivitas ekonomi, terutama di sektor informal dan usaha kecil, serta menurunkan pendapatan masyarakat.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini menitikberatkan pada dinamika lokal Kota Padang, termasuk bagaimana kebijakan pemerintah kota diterapkan dan direspons oleh masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi setempat.

#### **Analisis dan Temuan Utama**

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa: (1). Kasus COVID-19 di Kota Padang mencapai puncak pada 2021 seiring dengan masuknya varian Delta. (2). Kebijakan pemerintah kota cukup responsif, dimulai dari PSBB (2020), PPKM (2021), hingga vaksinasi massal (2022). (3). Dampak sosial-ekonomi sangat terasa, terutama pada sektor pendidikan dan UMKM. (4). Kondisi lokal, seperti budaya gotong royong dan tingkat kepatuhan masyarakat, turut memengaruhi efektivitas kebijakan yang diterapkan.

#### **SIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan COVID-19 di Kota Padang pada periode 2020–2022 mengalami dinamika yang kompleks, baik dari segi kebijakan maupun dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan. Kasus COVID-19 di Kota Padang mencapai puncak pada tahun 2021 seiring dengan masuknya varian Delta. Pemerintah Kota Padang merespons situasi

tersebut melalui penerapan kebijakan PSBB pada tahun 2020, PPKM ketat pada 2021, dan program vaksinasi massal pada 2022.

Dari sisi sosial, pandemi berdampak pada perubahan pola pendidikan, pembatasan aktivitas keagamaan, dan berkurangnya interaksi budaya masyarakat Minangkabau. Dari sisi ekonomi, pelaku UMKM dan pekerja informal menjadi kelompok yang paling terdampak akibat menurunnya aktivitas ekonomi.

Penelitian ini memiliki keunikan (novelty) karena memberikan gambaran spesifik mengenai dinamika lokal di Kota Padang, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada tingkat nasional. Temuan ini menunjukkan bahwa kondisi sosial, budaya, dan ekonomi lokal sangat memengaruhi efektivitas kebijakan penanganan pandemi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Djalante, R., Lassa, J., Setiamarga, D., Sudjatma, A., Indrawan, M., Haryanto, B., Mahfud, C., Sinapoy, M.S., Djalante, S., Rafliana, I., Gunawan, L. A., Surtiari, G. A. K., Warsilah, H. (2020). Review and analysis of current responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020. *Science Direct. Elsevier*. 6. <https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2020.100091>
- Hartanto, D., & Hidayat, N. (2022). Analysis of community activity restriction policy (PPKM) during the COVID-19 pandemic. *Journal of Governance and Regulation*. <https://doi.org/10.22495/jgrv11i2art12>.

- Herliandry, L. D., Nurhasanah, N., Suban, M. E., & Kuswanto, H. (2020). Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19. *JTP - Jurnal Teknologi Pendidikan*, 22(1), 65–70.  
<https://doi.org/10.21009/jtp.v22i1.15286>
- Mokodompis, Y., & Ahmad, Z. (2021). Evaluation Of Compliance With The Implementation Of Health Protocols In Public Places During The Covid-19 Pandemic In Gorontalo District. *Jambura Journal of Health Sciences and Research*.  
<https://doi.org/10.35971/JJHSR.V3I2.10490>.
- Prasetyo, M., & Yasa, I. (2024). Pengaruh Kebijakan Ppkm, Insentif, Dan Flextime Terhadap Pendapatan Pengemudi Gojek Masa Pandemi Covid-19 Di Denpasar. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*.  
<https://doi.org/10.24843/eeb.2024.v13.i02.p10>.
- Samin, R. (2021). Central-Local Government dalam Manajemen Bencana Pandemi COVID-19 di Indonesia. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*.  
<https://doi.org/10.37329/ganaya.v4i2.1419>.
- Sudrajat, T., Priadi, M., Sikki, N., Wulandari, W., & Imaniar, W. (2021). ORGANIZATIONAL DIMENSIONS OF THE COVID 19 TASK FORCE. *Jurnal Governansi*.  
<https://doi.org/10.30997/jgs.v7i2.4055>.
- Syafrida, S., & Hartati, R. (2020). Bersama Melawan Virus Covid 19 di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(6), 495–508.
- <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15325>